

KERELAWANAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN



Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018



KERELAWANAN

TENAGA KESEJAHTERAAN

SOSIAL KECAMATAN



Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018

Aulia Rahman dkk

KERELAWANAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,- Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2018
x + 80, halaman 14,5 x 21 cm.

Penulis :

Zulmasyhur, Aulia Rahman, Setyo Sumarno, Mulia Astuti,
Hari Harjanto Setiawan, Haryati Roebyantho,
Ahmad Suhendi, Alit Kurniasari, Husmiati, Ruaida Murni

Perwajahan :
Nawir

ISBN : 978-602-53459-7-5

Cetakan I: Desember 2018

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,
Kementerian Sosial RI - Jakarta
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang II Jakarta Timur,
Telp. 021-8017146, Fax.021-8017126

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidanakan dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan atas ridha Allah SWT sehingga buku hasil penelitian tentang *Kerelawanan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* telah terselesaikan. Buku ini merupakan hasil penelitian cepat (*quick research*) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang kerelawanan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; sejauhmana implementasi Tugas dan Fungsi TKSK; menggambarkan bentuk dukungan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan partisipasi TKSK.

Buku hasil penelitian ini secara khusus diharapkan dapat membantu pihak Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Direktorat PSPKKM) sebagai satuan kerja pembina TKSK tingkat pusat dan dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota sebagai pembina di tingkat daerah. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi Direktorat PSPKKM terkait rencana revisi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kebijakan terkait pembinaan TKSK.

Puslitbangkesos mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian sekaligus permohonan maaf jika terdapat kekurangan, baik selama proses penelitian sampai pada terbitnya buku hasil penelitian ini. Semoga buku hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan



pihak lain yang *concern* dalam dunia relawan sosial khususnya TKSK dan diharapkan buku hasil penelitian ini dapat memacu penelitian – penelitian lanjutan mengenai TKSK.

Jakarta, Desember 2018

Kepala Puslitbangkesos,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mulia Jonie', written over the printed name below it.

Mulia Jonie



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konsep	10
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metodologi Penelitian	13
H. Organisasi Penelitian	16
BAB II : HASIL PENELITIAN	17
A. Provinsi Sumatera Selatan	17
B. Provinsi D.I. Yogyakarta	28
C. Provinsi Kalimantan Selatan	38
D. Provinsi Nusa Tenggara Barat	50
Bab III: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	68
SEKILAS PENULIS	69
INDEKS	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Persebaran TKSK Sampai Tahun 2017.....	3
Tabel 2. Lokasi Penelitian	14
Tabel 3. Variabel dan Indikator Penelitian	14
Tabel 4. Jadwal Penelitian	15
Tabel 5. Hasil analisis korelasi kerelawan sosial (X) dengan tugas dan fungsi (Y1) serta Penghargaan dan pembinaan (Y2) TKSK di Provinsi Sumatera Selatan	24
Tabel 6. Hasil analisis korelasi kerelawan sosial (X) dengan tugas dan fungsi (Y1) serta Penghargaan dan pembinaan (Y2) TKSK di Provinsi D.I. Yogyakarta	35
Tabel 7. Hasil analisis korelasi kerelawan sosial (X) dengan tugas dan fungsi (Y1) serta Penghargaan dan pembinaan (Y2) TKSK di Provinsi Kalimantan Selatan	46
Tabel 8. Hasil analisis korelasi kerelawan sosial (X) dengan tugas dan fungsi (Y1) serta Penghargaan dan pembinaan (Y2) TKSK di Provinsi Nusa Tenggara Barat	60



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jenis Kelamin Responden di Provinsi Sumatera Selatan	17
Grafik 2.	Usia Responden di Provinsi Sumatera Selatan	18
Grafik 3.	Persyaratan Usia menurut Responden di Provinsi Sumatera Selatan	19
Grafik 4.	Pendidikan Responden di Provinsi Sumatera Selatan	20
Grafik 5.	Pekerjaan Responden di Provinsi Sumatera Selatan	21
Grafik 6.	Latar Belakang Organisasi Responden di Provinsi Sumatera Selatan	21
Grafik 7.	Tahun menjadi Anggota TKSK di Provinsi Sumatera Selatan	22
Grafik 8.	Keterlibatan TKSK dalam Pendampingan Program di Provinsi Sumatera Selatan	23
Grafik 9.	Korelasi Kerelawanan Sosial dengan Implementasi Penghargaan & Pembinaan TKSK di Provinsi Sumatera Selatan	25
Grafik 10.	Implementasi Tugas dan Fungsi TKSK di Provinsi Sumatera Selatan	27
Grafik 11.	Implementasi Penghargaan dan Pembinaan TKSK di Provinsi Sumatera Selatan	28
Grafik 12.	Jenis Kelamin Responden di Provinsi D.I. Yogyakarta	28
Grafik 13.	Usia Responden di Provinsi D.I. Yogyakarta	29
Grafik 14.	Persyaratan Usia menurut Responden di Provinsi D.I. Yogyakarta	30
Grafik 15.	Pendidikan Responden di Provinsi D.I. Yogyakarta	30



Grafik 16. Pekerjaan Responden di Provinsi D.I. Yogyakarta	31
Grafik 17. Latar Belakang Organisasi Responden di Provinsi D.I. Yogyakarta	32
Grafik 18. Tahun menjadi Anggota TKSK di Provinsi D.I. Yogyakarta	32
Grafik 19. Keterlibatan TKSK dalam Pendampingan Program di Provinsi D.I. Yogyakarta	33
Grafik 20. Korelasi Kerelawanan Sosial dengan Implementasi Tugas & Fungsi TKSK di Provinsi D.I. Yogyakarta	36
Grafik 21. Korelasi Kerelawanan Sosial dengan Implementasi Penghargaan & Pembinaan TKSK di Provinsi D.I. Yogyakarta	36
Grafik 22. Implementasi Tugas dan Fungsi TKSK di Provinsi D.I. Yogyakarta	37
Grafik 23. Implementasi Penghargaan dan Pembinaan TKSK di Provinsi D.I. Yogyakarta	38
Grafik 24. Jenis Kelamin Responen TKSK di Provinsi Kalimantan Selatan	39
Grafik 25. Usia Responden di Provinsi Kalimantan Selatan	39
Grafik 26. Persyaratan Usia menurut Responden di Provinsi Kalimantan Selatan	40
Grafik 27. Pendidikan Responden di Provinsi Kalimantan Selatan	41
Grafik 28. Pekerjaan Responden di Provinsi Kalimantan Selatan	41
Grafik 29. Latar Belakang Organisasi Responden di Provinsi Kalimantan Selatan	42
Grafik 30. Tahun menjadi Anggota TKSK di Provinsi Kalimantan Selatan	43
Grafik 31. Keterlibatan TKSK dalam Pendampingan Program di Provinsi Kalimantan Selatan	44



Grafik 32. Korelasi Kerelawanan Sosial dengan Implementasi Tugas & Fungsi TKSK di Provinsi Kalimantan Selatan	47
Grafik 33. Korelasi Kerelawanan Sosial dengan Penghargaan & Pembinaan TKSK di Provinsi Kalimantan Selatan	47
Grafik 34. Implementasi Tugas dan Fungsi TKSK di Provinsi Kalimantan Selatan	48
Grafik 35. Implementasi Penghargaan dan Pembinaan TKSK di Provinsi Kalimantan Selatan	49
Grafik 36. Jenis Kelamin Responden TKSK di Provinsi Nusa Tenggara Barat	50
Grafik 37. Usia Responden di Provinsi Nusa Tenggara Barat	51
Grafik 38. Persyaratan Usia menurut Responden di Provinsi Nusa Tenggara Barat	52
Grafik 39. Pendidikan Responden di Provinsi Nusa Tenggara Barat	53
Grafik 40. Pekerjaan Responden di Provinsi Nusa Tenggara Barat	54
Grafik 41. Latar Belakang Organisasi Responden di Provinsi Nusa Tenggara Barat	56
Grafik 42. Tahun menjadi Anggota TKSK di Provinsi Nusa Tenggara Barat	57
Grafik 43. Keterlibatan TKSK dalam Pendampingan Program di Provinsi Nusa Tenggara Barat	58
Grafik 44. Korelasi Kerelawanan Sosial dengan Implementasi Tugas & Fungsi TKSK di Provinsi Nusa Tenggara Barat	61
Grafik 45. Korelasi Kerelawanan Sosial dengan Implementasi Penghargaan & Pembinaan TKSK di Provinsi Nusa Tenggara Barat	61



Grafik 46. Implementasi Tugas dan Fungsi TKSK di Provinsi Nusa Tenggara Barat	62
Grafik 47. Implementasi Penghargaan dan Pembinaan TKSK di Provinsi Nusa Tenggara Barat	63



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Wisnu, M. Saleh Soeaidy, Stefanus Pani Rengu (2014), Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 202-209.
- Kementerian Sosial RI (2017), Paparan Dirjen Pemberdayaan Sosial: Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pendampingan Program Rastra dan BPNT.
- Sutaat, Moch. Syawie, Bambang Pudjianto (2013), *Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta:P3KS Press.
- Wolf, Thomas, (2012). *Managing a Nonprofit Organization Updated Twenty First Century*. New York: Free Press.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.



TKSK menurut Permensos RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dibentuk untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Diantara beberapa SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, TKSK memiliki keunikan tersendiri karena mempunyai cakupan wilayah kerja yang jelas, yakni kecamatan. Sejak dibentuk pada tahun 2009, secara kuantitas TKSK mengalami peningkatan karena berbanding lurus dengan dinamika pemekaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan Kerelawanan TKSK memiliki korelasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi TKSK yang mendukung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta penghargaan dan pembinaan bagi TKSK memiliki korelasi terhadap tingkat Kerelawanan TKSK sehingga sangat wajar jika TKSK dianggap sebagai pengejawantahan dari relawan sosial.

Peningkatan kapasitas TKSK harus terus diberikan dan dikembangkan untuk menguatkan sikap kerelawanan dan kemampuan TKSK dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perlu adanya revisi dan penambahan batang tubuh pada Permensos Nomor 24 Tahun 2013 tentang TKSK menyesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan di lapangan. Perlu juga monitoring dan evaluasi kinerja TKSK secara berkelanjutan dan penambahan tali asih yang menyesuaikan dengan kondisi, beban tugas TKSK.

ISBN 978-602-53459-7-5



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang, Jakarta Timur. Telp (021) 8017126
Website: www.puslit.kemosos.go.id E-mail: puslitbangkesos@kemosos.go.id